

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



VISI

*Terwujudnya
Masyarakat
Jayawijaya Yang
Sejahtera, Mandiri
Secara Ekonomi,
Berkualitas dan
Berbudaya*

MISAI

*Terwujudnya
Masyarakat
Jayawijaya Yang
Sejahtera, Mandiri
Secara Ekonomi,
Berkualitas dan
Berbudaya*

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang telah dilakukan indikator dan program prioritas serta strategis.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga Renstra ini dapat menjadi akselerator dan panduan dalam pembangunan ketahanan pangan lima tahun mendatang.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



Drs. IMADE PUTRA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650416 199703 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1. Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan.....	6
1.4. Alur Proses Penyusunan Renstra.....	7
1.5. Sistematik Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAN RUANG KABUPATEN.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.....	10
2.1.1 Tugas Pokok.....	10
2.1.2. Fungsi.....	11
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	12

2.2.	Sumber Daya Prangkat Daerah.....	34
2.2.1.	Sumber Daya Manusia.....	34
2.2.2.	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	34
2.2.3.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan.....	35
2.2.4.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
2.2.5.	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	37
2.2.6.	Jumlah Pegawai DKP Menurut Jenis Kelamin.....	37
2.2.7.	Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan.....	39
2.3.	Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.....	41
2.4.	Tantangan Dan Peluang Dinas Ketahanan Pangan	44
2.4.1.	Tantangan.....	44
2.4.2.	Peluang.....	46
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	54
3.1.	Identifikasi Permasalahan	54
3.2.	Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih.....	55
3.2.1.	Visi.....	55
3.2.2.	Misi.....	58
3.3.	Telaah Renstra K/L.....	60
3.4.	Penentuan Isu – isu Stategis.....	64
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	67
4.1.	Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.....	67
4.2.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan....	68

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA.....	71
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	71
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	80
	6.1. Rencana Program.....	80
	6.2. Rencana Kegiatan.....	81
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	101
BAB VIII	PENUTUP.....	105
	8.1. Ringkasan.....	105
	8.2. Saran.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai DKP Menurut Kelompok Umur.....	34
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai DKP Menurut Golongan Kepangkatan.....	35
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai DKP Menurut Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	37
Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai DKP Menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel 2.6.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan/Eselon.....	39
Tabel 2.7	Jumlah Aset Menurut Jenis s/d Tahun 2021.....	40
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018.....	42
Tabel 2.8	Jumlah Anggaran dan Realisasi Kinerja Anggaran DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 – 2018.....	43
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah di Bidang Pangan.....	55
Tabel. 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah.....	59
Tabel 3.3.	Keterkaitan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayawijaya dengan Sasaran Renstra Kementerian Terkait.....	61
Tabel.3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	62
Tabel 3.5.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	63
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	64
Tabel 3.7.	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	65
Tabel 3.8.	Nilai Skala Kriteria.....	65
Tabel 3.9	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis.....	66
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Periode Tahun 2019 -2023.....	70
Tabel 5.1.	Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.....	71
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023.....	76
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023.....	78

Tabel 6.1	Rencana Kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023.....	82
Tabel 6.2.	Rencana Kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023.....	83
Tabel 6.3.	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Periode 2019 -2023.....	89
Tabel 7.1	Indicator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	104

DAFTAR GAMBAT

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra PD..... 7

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayawijaya Tahun 2021..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah; Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 18 April 2012 tentang pangan menyatakan bahwa Pemerintah bersama rakyat bertanggung jawab atas terwujudnya Ketahanan pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistim Ketahanan Pangan yaitu: (1) sub sistim ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (2) subsistim distribusi pangan, diartikan dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh

wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan (3) subsistem konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Penyusunan Renstra DKP Kabupaten Jayawijaya dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi antar bidang-bidang yang terkait, perumusan rancangan Renstra, perbaikan dan koreksi dan penetapan, sehingga di harapkan akan di peroleh Dokumen Renstra yang terukur, dan mengakomodir semua bidang yang ada.

Dengan disusunnya Renstra periode 2021-2026 maka DKP Kabupaten Jayawijaya memiliki panduan dan arahan dalam mewujudkan cita-cita besar daerah yaitu menuju Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

14. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan DKP Kabupaten Jayawijaya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pelaksanaan program dan kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan fungsinya

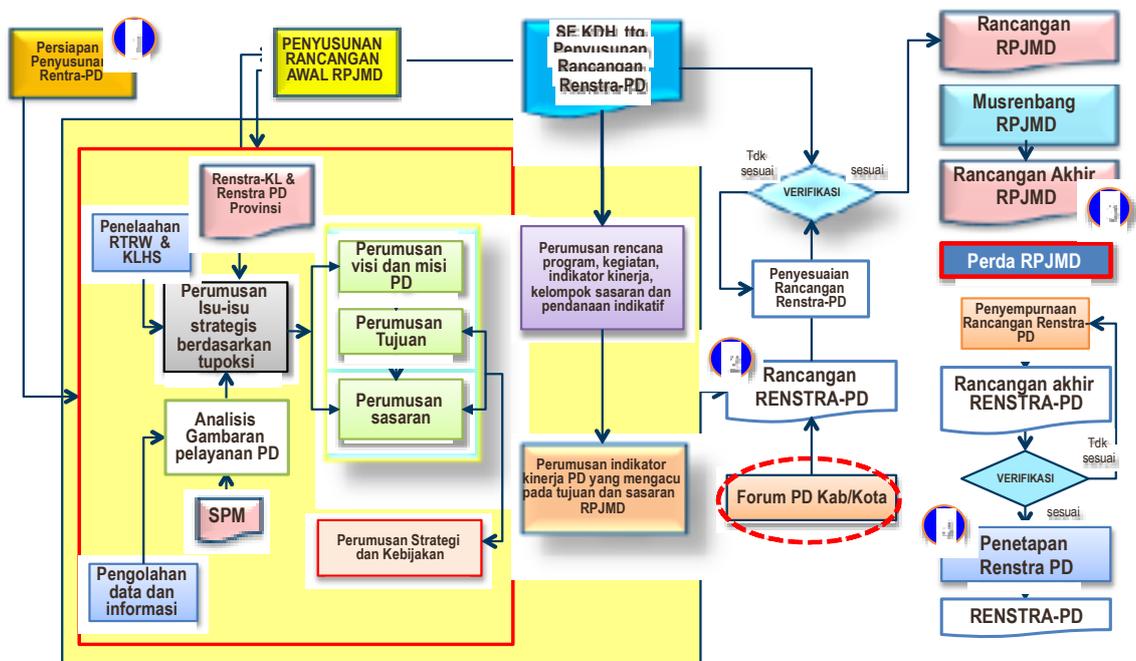
1.3.2. Tujuan

1. Penyamaan persepsi antar SOPD teknis terkait ketahanan pangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan program secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DKP Kabupaten Jayawijaya;
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan dan Penyuluhan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

1.4. ALUR PROSES PENYUSUNAN RENSTRA

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra PD



1.5. SISTEMATIK PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAAN RUANG KABUPATEN

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANANA PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dibentuk dalam rangkameningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan peningkatan peran dan fungsi bidang urusan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu untuk menjamin kondisi kecukupan pangan rakyat Indonesia terpantau dan tertangani dengan baik. Berdasarkan Perda diatas, Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan

2.1.1. TUGAS POKOK

Untuk menjalan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan insfratraktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribus pangan, cadangan pangan, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangn.

2.1.2. FUNGSI

Dalam tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya terdiri :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris (Eselon III.a) yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Bidang/Eselon III.b, membawahi:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, yang dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Bidang, membawahi dua seksi, yaitu :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan;
5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan yang dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Bidang/Eselon III.b, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Pangan
 2. Seksi Cadangan Pangan
6. Bidang Keamanan Pangan yang dipimpin oleh seorang pejabat Kepala Bidang/Eselon III.b, membawahi :

- a. Seksi Kelembagaan danKeamanan Pangan
 - b. Seksi Kerjasama dan Informasi Kemanan Pangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang keamanan pangan;
- e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok memimpin tugas kesekretariatan dinas untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi :

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumah tanggaan dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. Mengelola sarana prasarana perkantoran, urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
- d. Melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Keuangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- d. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD, SPM dan laporan lainnya;
- e. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan kerjasama;
- f. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan ketahanan pangan dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- i. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III.b), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:

3.1. Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan Ketersediaan Pangan.

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketersediaan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang ketersediaan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketersediaan pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) ;
- e. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja yang indikatornya dibidang Ketersediaan Pangan;
- i. Menyiapkan bahan kordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional(HBKN).
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ketersediaan pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- k. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Ketersediaan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

3.2. Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kerawanan pangan. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis urusan kerawanan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam urusan kerawanan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kerawanan pangan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;

- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, pemetaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang kerawanan pangan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kerawanan pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,
- j. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kerawanan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangandi bidang distribusi dan cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi:

4.1. Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan distribusi pangan. Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas sbb :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang distribusi pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang distribusi pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang distribusi pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi harga pangan, rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang distribusi pangan;

- g. Mendistribusikan bantuan bahan pokok dan sarana produksi ke daerah rawan bencana;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang distribusi pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,
- i. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Distribusi Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

4.2. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang cadangan pangan. Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang cadangan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang cadangan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang cadangan pangan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya dibidang cadangan pangan;

- e. Melakukan penyiapan pangadaan, pengelolaan, dan peyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pemberdayaan desa mandiri pangan, dengan pembinaan pemanfaatan pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- f. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan dan penyimpanan pangan yang layak;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang cadangan pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,
- h. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Cadangan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang konsumsi dan penganeka ragaman pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan.

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi :

5.1. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam sub bidang konsumsi pangan.

Kepala Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang konsumsi pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang konsumsi pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang konsumsi pangan;
- d. Menyiapkan perhitungan angka dan tingkat konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- f. Menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan dan peningkatan pangan keluarga ramah anak ;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang konsumsi pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,

- i. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Konsumsi Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

5.2. Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan

Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan promosi penganekaragaman pangan.

Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang promosi penganekaragaman pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang promosi penganekaragaman pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang promosi penganekaragaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Menyiapkan promosi dan Pendampingan mitra kerja pemerintah (KTNA);
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan penganeka ragaman konsumsi pangan non beras dan non terigu;

- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang Promosi Penganekaragaman Pangan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang promosi penganekaragaman pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,
- j. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

6. Bidang Keamanan Pangan.

Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan keamanan pangan.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan informasi keamanan pangan.

Kepala Bidang Keamanan Pangan membawahi dua seksi, yaitu :

6.1. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kelembagaan dan keamanan pangan.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- d. Menyiapkan bahan untuk sertifikasi sebagai jaminan keamanan pangan segar;
- e. Menyiapkan ijin keluar dan masuk sebagai jaminan keamanan pangan segar.
- f. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan

SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang kelembagaan dan keamanan pangan;

- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan keamanan pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,
- i. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

6.2. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan keamanan pangan;
- f. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja yang indikatornya dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,
- j. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk kondisi saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya belum memiliki unit pelayanan teknis penunjang tertentu di lapangan.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

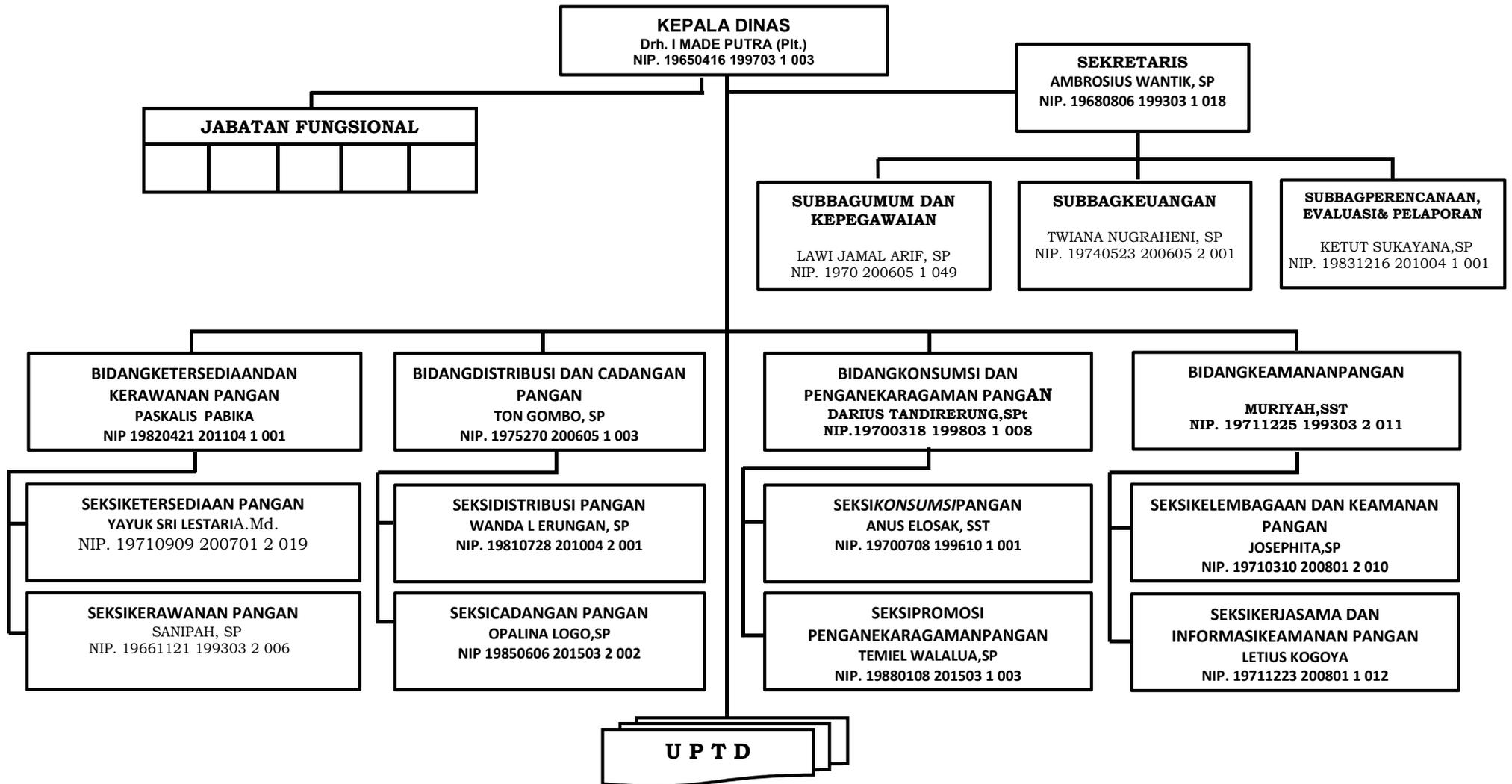
Uraian tugas kelompok jabatan fungsional, adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
- d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
- f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kondisi saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya belum memiliki Kelompok Jabatan Fungsional tertentu di lapangan.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayawijaya Tahun 2021



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebagaimana diuraikan dibawah ini.

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijayayang berada di kelompok umur diatas 50- 40 tahun sebanyak 12 Orang, umur 40 -25 sebanyak 10 Orang,

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DKP Menurut Kelompok Umur

No.	UnitKerja	Umur							Jmlh.
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	1	1	2	6
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	1	1	1	1	0	4
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	-	-	0	2	3	0	0	5
5	Bidang Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	3	0	3
6	BidangKonsumsi dan Penganekaragaman Pangan	-	-	1	-	1	1	-	3
TOTAL		-	-	2	3	7	6	3	22

2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan

Terdapat 2 orang pegawai jenjang kepangkatannya pada Golongan IV, 16 orang pegawai Golongan III, dan 4 orang Golongan II. Untuk jelasnya jumlah pegawai menurut golongan kepangkatan digambarkan dalam Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai DKP Menurut Golongan Kepangkatan

No	Unit Kerja					Jmlh.
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4	0	6
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	1	3	0	4
4	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	-	1	4	-	5
5	Bidang Keamanan Pangan	-	1	1	1	3
6	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	-	-	3	-	3
TOTAL		-	5	15	2	22

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 1 orang, dan selebihnya tingkat pendidikan S1 sebanyak 12 orang dan yang pendidikan S2 sebanyak 4 orang. Dari data tersebut

disimpulkan bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya didominasi oleh tenaga yang berpendidikan S1 yaitu sebanyak 13 orang (59,09 %). Dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan kapasitas pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata pegawai cukup memadai. Untuk menunjang upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik, masih diperlukan adanya penambahan personel. Data pegawai menurut pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DKP Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jmh
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	2		4	-	6
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	1	2	-	4
4	Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan		-	2	1	3
5	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1	-	5	1	5
6	Bidang Keamanan Pangan	1	-	1	1	3
7	Kelompok Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		5	1	12	4	22

2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, jumlah jabatan struktural yang telah terisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural dari 17 formasi jabatan yang tersedia, ditambah dengan Staf dinas sebanyak 5 orang, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
4	Jabatan Fungsional	-
5	Staf	5
TOTAL		22

2.2.5. Jumlah Pegawai DKP Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sebagian besar merupakan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 18 orang dan pegawai perempuan berjumlah 10 orang.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai DKP Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	5	1	6
3	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	2	4
4	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	3	0	3
5	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	2	3	5
6	Bidang Keamanan Pangan	1	2	3
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		14	8	22

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan/jenjang eselon, maka berdasarkan perbandingan gender pemegang jabatan struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya yaitu ASN dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang (58,82%) berkedudukan sebagai pemegang jabatan struktural (Eselon II, III dan IV), dan 7 orang (41,18%)

pejabat struktural berjenis kelamin perempuan. Jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya belum terisi, khususnya untuk beban tugas analisis mutu dan keamanan pangan. Dibutuhkan adanya rekrutmen tenaga fungsional yang cukup untuk menunjang percepatan pencapaian tujuan pembangunan bidang pangan yang lebih baik.

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan/Eselon	JenisKelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	5	6	11
4	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		10	7	17

2.2.7. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tersebut, juga diperlukansarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan yang memadai. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Ketahanan Pangan untuk sementara ini dirasakan telah dapat menunjang kinerja dinas, namun masih belum memadai bila dibandingkan dengan beban kerja organisasi.

Secara umum aset yang tersedia berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik.

Tabel 2.7 Jumlah Aset Menurut Jenis s/d Tahun 2021

Jenis Aset	Jumlah	Kondisi			Tahun	Nilai Perolehan	Ket
		RB	RR	B			
Kendaraan roda 4	3	3		-			
Kendaraan roda 2	22	20		2			
Meja kerja	46	46		-			
Kursi kerja	99	92		7			
Lemari	13	13		-			
Rak buku+Filling Cabinet	19	19		-			
Komputer PC	15	15		-			
Laptop	3	3		-			
Printer	17	17		-			
Mesin Fax	1	1		-			
Infocus	2	2		-			
Mesin Babat Rumput	4	4		-			
Televisi LCD 32"	1	1		-			
Wireless	2	2		-			
Jumlah

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya sudah dapat dikatakan memenuhi kebutuhan operasional dinas, namun seiring dengan beban kerja dinas sangat diperlukan adanya pemeliharaan rutin/berkala dan pengadaan sarana dan prasarana agar supaya dapat

mendukung meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan program pembangunan di bidang pangan dan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. KINERJA PELAYANAN DAN ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2018					Realisasi Capaian Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
				1	Ketersediaan Pangan Utama	Kkal/kap / hari	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.115
2	Nilai Pola Pangan Harapan	%	-	100	100	100	100	100	38,00	38,50	39,00	39,50	40,00
3	Meningkatnya Transparansi Nilai SAKIP	%	-	100	100	100	100	100	30,00	35,00	40,00	46,00	48,50

Tabel 2.9 Jumlah Anggaran dan Realisasi Kinerja Anggaran DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Jumlah Anggaran pada Tahun (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (000)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	260.000	576.760	549.383	509.310	366.198	252.901	560.065	539.156	493.788	358.253
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.931.830	2.823.613	2.764.895	210.430	135.302	2.927.881	2.810.465	2.680.760	209.020	131.552
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	1.175.000	2.188.000	-	-	-	1.122.880	2.168.448	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100.000	294.000	-	75.000	-	98.736	287.625	-	74.904
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	95.000	-	-	-	-	95.000	-	-
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.130.083.	150.000	546.785	-	-	1.107.373	150.000	545.516	-	-
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000	-	14.000	-	10.000	20.000	-	12.576	-	10.000
8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	27.908	90.000	-	588.567	1.175.000	27.908	89.958	-	334.283	1,172.203
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN-TP)	1.049.500	943.893	206.148	156.000	435.868	1.049.500	932.893	203.148	156.000	435.868
10	Peningkatan pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. (APBN-DK)	140.610	-	205.242	30.000	-	140.610	-	181.442	30.000	-
	J u m l a h	5.559.931	5.859.266	6.863.453.	1.494.307	2.197.368	5.526.173	5.764.997	6.713.671	1.223.091	2.182.780

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG DINAS KETAHANAN PANGAN

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya akan semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan pelayanan dibidang pangan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan penyelenggaraan program peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhankebutuhan pokok masyarakat, diuraikan di bawah ini.

2.4.1 Tantangan

2.4.1.1 Harga Bahan Pangan cenderung masihTinggi

Kurangnya infrastruktur perhubungan darat untuk mendukung distribusi logistik bahan makanan membuat biaya distribusi pangan menjadi tinggi sehingga pada akhirnya mengakibatkan harga bahan pangan yang tersedia dimasyarakat menjadi mahal.

2.4.1.2. Fungsi kelembagaan Pemerintah dan masyarakat belum optimal.

Fungsi koordinasi antar dinas terkait dan fungsi kelembagaan pangan lainnya, baik lembaga pemerintah, swasta maupun kelembagaan pangan masyarakat

belum optimal atau belum berjalan dengan baik, kekuatan dukungan terhadap pembangunan pangan daerah pada masing-masing unit kerja berlangsung secara spasial atau belum terintegrasi, sehingga program-program pembangunan bidang pangan yang ditujukan kepada masyarakat tidak membuahkan hasil yang optimal.

2.4.1.3 Ketergantungan masyarakat kepada bantuan Pemerintah.

Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah di bidang pangan masih sangat tinggi, baik bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun swakarsa, swakarya dan kemandirian dalam mencapai ketahanan pangan. Kondisi swasembada pangan daerah masih jauh dari harapan.

2.4.1.4. Masih adanya ego sektoral antar instansi terkait.

Bidang ketahanan pangan sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan bidang kerja lainnya, seperti Bidang Pertanian, Pekerjaan Umum, Perindagkop, Kesehatan, Pendidikan, Penanaman Modal, Perhubungan dan Pertanahan. Namun dalam perencanaan maupun pelaksanaan, belum terjalin sinkronisasi. Masih kurang adanya koordinasi untuk menciptakan sinergitas dalam penyusunan program-program pembangunan daerah. Setiap instansi merencanakan dan melaksanakan programnya masih berdasarkan

kewenangan dan kepentingan instansi masing-masing.

2.4.1.5. Masih terbatasnya Bahan Baku dan UPH (Unit Pengolahan Hasil) untuk Diversifikasi pangan Lokal.

Dalam rangka komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal, pengembangan bahan pangan masyarakat hanya terfokus pada beberapa jenis tanaman pangan saja terutama umbi-umbian. Hal tersebut cukup sulit untuk menciptakan diversifikasi pangan karena tidak tersedianya bahan baku pangan lainnya dengan jumlah yang mencukupi. Demikian juga, pengembangan UPH di Kabupaten Jayawijaya belum mendapatkan perhatian yang cukup dari masyarakat, juga dari Pemerintah Daerah.

2.4.2 Peluang

2.4.2.1. Regulasi Urusan Ketahanan Pangan.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang didukung dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bidang ketahanan pangan, yang didalamnya memuat ketersediaan, kerawanan, konsumsi dan keamanan pangan. Untuk meningkatkan status ketahanan pangan daerah, dapat dibuat regulasi tentang pangan yang mengatur tentang upaya-upaya menjaga kestabilan jumlah ketersediaan bahan pangan produksi lokal, pemasukan bahan pangan

yang tidak diproduksi di dalam daerah, seperti beras, terigu, minyak goreng, dan lain sebagainya. Regulasi mengatur juga tentang pemerataan distribusi dan konsumsi pangan masyarakat agar seluruh penduduk di Kabupaten Jayawijaya dapat mengakses pangan secara seimbang dan berkelanjutan.

Sejauh ini regulasi tentang pengembangan ketahanan pangan telah tersedia dalam bentuk Undang-Undang yang menggariskan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya di Kabupaten Jayawijaya telah dibentuk pula Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) yang diketuai oleh Bupati dengan beranggotakan para pimpinan OPD yang terkait dengan pengembangan ketahanan pangan di daerah, dimana DKPD ini mempunyai kewenangan dan tugas untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pangan di daerah, merancang strategi kebijakan dan membuat regulasi untuk mengatur pelaksanaan pembangunan pangan di daerah.

2.4.2.2 Kondisi Daerah termasuk prioritas penanganan rawan pangan.

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu daerah yang mendapat prioritas kebijakan ketahanan pangan provinsi dan nasional dalam hal penanganan daerah rawan pangan. Akibat dari kondisi alam yang rata-rata bergunung dan berbukit, serta kondisi usaha pertanian rakyat yang rata-rata masih bersifat subsisten (produksi hanya untuk menyediakan bahan pangan keluarga sehari-hari) dengan tingkat produksi dan produktifitas di bawah standar nasional,

menjadikan Kabupaten Jayawijaya mendapat perhatian khusus dalam penanganan kerawanan pangan untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan daerah.

2.4.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Ketahanan Pangan.

Selama ini meskipun masyarakat antusias dalam menyambut bantuan dari pemerintah diberbagai bidang, berdasarkan hasil pemantauan terbukti bahwa partisipasi masyarakat untuk secara mandiri mendukung kebijakan-kebijakan di bidang ketahanan pangan masih rendah sehingga keberlanjutan program dimasyarakat seringkali tidak dapat tercapai. Setelah dilakukan pembinaan yang intensif dalam beberapa tahun terakhir dukungan meningkat cukup signifikan, jumlah partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diluncurkan untuk meningkatkan ketahanan pangan meningkat. Dengan adanya perkembangan yang demikian, maka diprediksi pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan selanjutnya akan semakin disambut baik oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

2.4.2.4. Potensi Sumber Pendanaan untuk Swasembada Pangan.

Pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah, baik dalam pembangunan fisik sarana dan prasarana maupun pembangunan non fisik yang didukung dengan penyediaan anggaran pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Otonomi Khusus (OTSUS), DanaAlokasi Khusus (DAK), ataupun sumber dana lainnya.

Selama ini penyediaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan peningkatan ketahanan pangan tergolong kecil dan terbatas, hal ini disebabkan oleh belum dimasukkannya urusan ketahanan pangan kedalam prioritas utama daerah, salah satunya adalah karena masih kecilnya nilai tawar Dinas Ketahanan Pangan akan hasil/dampak langsung ataupun hasil tak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

Secara umum kinerja Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 2019-2023 ditingkatkan, rencana program dan kegiatan mengarah kepada peningkatan sistem ketahanan pangan daerah yang terpadu dengan target capaian kinerja dan dampak yang jelas dan terukur, membutuhkan relevansi pendanaan yang cukup. Dari segi ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tentu urusan peningkatan ketahanan pangan secara berkala dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sangat berpotensi untuk dipenuhi penganggarnya.

2.4.2.5. Dukungan Kinerja Bidang Urusan.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya ditunjukkan melalui peran aktifnya dalam setiap gerak pembangunan dan besarnya indikator keberhasilan yang dicapai. Peran setiap bidang urusan pada Dinas Ketahanan

Pangan meskipun belum cukup signifikan tetapi telah dirasakan dukungannya terhadap peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pelayanan administrasi publik maupun pembinaan ke lapangan. Walaupun belum adasajian data yang akurat, kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tupoksinya telah menunjukkan adanya pengaruh terhadap semakin menguatnya ketahanan pangan masyarakat sebagaimana terbukti dengan semakin meningkatnya ketersediaan pangan, khususnya bahan pangan lokal, semakin meratanya distribusi pangan, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pola konsumsi dan diversifikasi pangan, semakin menguatnya daya beli yang disebabkan oleh meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat, dan menurunnya tingkat kerawanan pangan dan kemiskinan.

A. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Ketersediaan pangan merupakan faktor utama dari terbentuknya ketahanan pangan, baik yang berupa produksi bahan pangan lokal maupun bahan pangan yang diimpor dari luar daerah. Aspek-aspek dalam ketersediaan pangan ini meliputi tingkat kecukupan dalam hal jumlah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari, bergizi seimbang, sehat dan aman, serta bermartabat.

Upaya peningkatan ketersediaan pangan ini dilakukan melalui pendekatan pembinaan kelompok tani dan kelompok ibu-ibu PKK. Kegiatan-kegiatan yang difasilitasi dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten maupun Provinsi langsung diarahkan ke kelompok tani dan kelompok PKK sesuai dengan alokasi kegiatannya.

Selaku pengemban tugas dan fungsi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mengupayakan adanya terobosan untuk meningkatkan kondisi ketersediaan pangan daerah yang lebih baik.

B. BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Dukungan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan salah satunya melalui gerakan pemanfaatan pekarangan sebagai upaya penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Upaya ini dilakukan melalui pendekatan pembinaan Kelompok Wanita Tani di lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Kegiatan Penanganan Desa Stunting. Kegiatan tersebut difasilitasi melalui pembiayaan dari APBD dan APBN yang diarahkan langsung kepada Kelompok Wanita Tani (KWT).

C. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan regulasi pemerataan distribusi pangan daerah dan kondisi kemampuan wilayah atau suatu lokasi dalam menyediakan pangan cadangan, serta pemantauan dan penanganan terhadap wilayah yang mengalami kekurangan pangan, terjadinya gejolak harga pangan dan keadaan darurat pangan.

Bidang ini fungsinya untuk memastikan pendistribusian bahan pangan ke segenap penjuru wilayah kabupaten dilakukan secara merata sehingga setiap penduduk dapat dijamin kesempatannya untuk bisa mengakses pangan dengan mudah, serta memastikan cukupnya cadangan pangan pemerintah daerah, yang terdiri atas cadangan pangan di tingkat pemerintahan desahinggadi tingkat kabupaten/kota.

D. BIDANG KEAMANAN PANGAN

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan kelembagaan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan pangan, baik di tingkat desa hingga tingkat kabupaten, seperti pembinaan Kelompok Tani, PKK, Kelompok Pemuda Tani, Kelompok Wanita Tani, KTNA dan kelompok-kelompok pengembangan pangan lainnya, serta pembinaan kepada masyarakat dalam hal kewaspadaan keamanan pangan.

Dalam hal pembinaan keamanan pangan, bidang ini bertugas memantau kondisi keamanan pangan yang beredar dimasyarakat, melalui pemeriksaan *sample* bahan pangan maupun *sample* pangan yang siap dikonsumsi, menyiapkan regulasi penanganan keamanan pangan, serta melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan terhadap para pelaku pangan di daerah. Berbagai keadaan yang memerlukan perhatian pemerintah untuk melakukan antisipasi, yaitu masih banyaknya terjadi berbagai kasus gangguan kesehatan masyarakat akibat pangan yang tidak aman dikonsumsi karena adanya cemaran mikrobiologi, cemaran fisik, maupun penggunaan bahan kimia berbahaya, serta masih dipasarkannya pangan kadaluarsa di masyarakat. Permasalahan penanganan keamanan pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, cenderung lebih banyak kepada tingkat pengetahuan masyarakat konsumen yang rendah, serta kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum para pelaku usaha pangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, faktor masalah diinventarisir dan diidentifikasi untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya apa yang sedang dihadapi dan membutuhkan penanganan segera sesuai skala prioritas. Dari hasil identifikasi akan dapat dihasilkan kesimpulan yang menjadi rekomendasi untuk mendorong dibuatnya rencana tindakan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan keadaan menjadi lebih baik atau dapat menyelesaikan masalah seluruhnya dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada pemerintah.

Dalam rangka penyusunan Renstra tahun 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi daerah saat ini untuk dilakukan penanganannya dalam masa pelaksanaan 5 tahun pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten

Jayawijaya, yaitu tahun 2018 hingga 2023, yang diuraikan sebagaimana dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah di Bidang Pangan

No	Pokok masalah	Masalah	Akar masalah
1	Regulasi ketahanan pangan	Belum adanya regulasi mengenai peningkatan ketahanan pangan	Belum adanya regulasi tentang ketahanan pangan
2	Belum terbentuknya perekonomian yang berdaya saing yang memberikan dampak pada disparitas	Rendahnya produktifitas sektor-sektor ekonomi produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas petani, 2. Kurangnya daya saing pada sektor ekonomi 3. Kurangnya kelembagaan ekonomi yang aktif 4. Belum meratanya dukungan utilitas

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

Ditegaskan dalam RPJMD, Visi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya periode tahun 2018–2023, yaitu :**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA”**

Penjelasan Visi tersebut sebagai berikut :

1. Sejahtera, dimaksudkan bahwa masyarakat Kabupaten Jayawijaya dapat dipastikan berada dalam kondisi tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia. Indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2023 dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing. Dengan melihat definisi mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator

ketercapaian kemandirian pada akhir periode RPJMD tahun 2023 dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah sebagaimana cerminan ketersediaan sumber daya yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga akan berdampak positif bagi meningkatnya lapangan kerja sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, serta meningkatkan persentase Pendapatan Asli Daerah sebagai cerminan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

3. Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan IQ (*Intelligentsia Quetions*), EQ (*Emotional Quetions*), dan Spiritual (*Spiritual Quetions*), serta sehat jasmani dan rohani dan mampu berdaya saing.
4. Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Kabupatn Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama, senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta. Tatanan

masyarakat Jayawijaya yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide dan kreatifitas sehingga pada akhir periode RPJMD masyarakat Jayawijaya mampu menghasilkan karya-karya budaya baik yang berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda, serta memiliki tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat dan dihormati oleh daerah lain.

3.2.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai sarana penyalaras gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara /pelaksana program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Misi pemerintah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
5. Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan

Pariwisata yang Berkelanjutan dan Memadai.

Visi dan Misi Bupati Jayawijaya tersebut selanjutnya dijadikan acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2018–2023 agar terjadi sinkronisasi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas, Dinas Ketahanan Pangan mengemban Misi 1 dan Misi 3 yakni

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.

Dalam setiap perencanaan program dan kegiatan, perlu diketahui adanya faktor penghambat dan faktor penentu keberhasilan, agar dapat dibuat strategi yang tepat. Untuk mempelajari adanya faktor penghambat dan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018-2023, maka dibuat telaah sebagaimana Tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Telaah Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal	Harga pangan pokok masih relatif tinggi	Belum tersedianya cadangan pangan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bekerjasama dengan Bulog menyediakan

dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan		sesuai dengan batas minimal	CPPD, untuk tahun 2019 sebesar 100 ton
Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan	Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara berkala
Sasaran : Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Rendahnya kualitas konsumsi masyarakat (skor PPH 58,4) dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras (110Kg/Kapita/Thn)	Budaya masyarakat yang mengganggu "belum makan bila belum makan nasi/ubi" dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya periode 2018–2023 maka sangat diperlukan juga dilakukannya sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dengan Renstra Provinsi Papua dan Renstra K/L sesuaidengan kewenangannya sehingga dapat terwujud kesesuaian

capaiannya secara berjenjang. Kesesuaian antaracapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target Provinsi dan Kementerian terkait, target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018–2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang urusan pangan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dengan Renstra K/L sebagai berikut

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayawijaya dengan Sasaran Renstra Kementerian Terkait

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya	Sasaran pada Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasio ketersediaan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam
2	Jumlah jenis bahan pangan yang dihasilkan	Menurunnya Jumlah penduduk rawan pangan	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
3	Jenis pangan segar yang diawasi	Tercapainya keamanan pangan segar	Tercapainya keamanan pangan segar
4	Jenis makanan yang dihasilkan	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman

5	Jumlah cadangan pangan yang tersedia	Meningkatnya cadangan pangan	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)
6	Jumlah laporan harga pangan pokok yang di hasilkan	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Telaah Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan	Jumlah penduduk rawan pangan masih tinggi	Belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan	Adanya data kemiskinan hasil PPLS
2.	Menurunnya konsumsi beras perkapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan	Menurunnya konsumsi bahan pangan lokal masyarakat (337kcal/hari/org)	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Berkembangnya teknologi pembuatan beras analog dan pemberian bantuan bibit varietas unggul ubi jalar

	harapan (PPH) yang tercapai			
3.	Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	Belum adanya penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dan lembaga pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kesetabilan distribusi dan harga pangan	Adanya pemantauan informasi pasokan dan harga pangan secara berkala
4.	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.	Masih ditemukannya kasus pangan yang tidak aman dikonsumsi	Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	Adanya koordinasi wacana dibentuknya Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
5	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Sering terjadi ketidaksinambungan antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Lemahnya koordinasi instansi lintas sektor	Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten telah dibentuk

Tabel 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No			Telaah Faktor
----	--	--	---------------

	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi DKP	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (UPM)	Masih terjadinya fluktuasi harga pangan pokok strategis Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya bukan daerah sentra produksi pangan pokok strategis	Potensi SDA untuk pengembangan produksi pangan pokok lokal masih terbukaluas

Tabel. 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Telaah Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kondisitopografi sebagian besar daerah yang dominan pegunungan/berbukit sehinggalahanya efektif untuk dieksploitasi untuk pengembangan produksi sumber pangan lokal	Belum semua desa/ kampung memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan	Belum memahami fungsi/manfaat lumbung pangan masyarakat	Adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN untuk pembangunan lumbung pangan desa

	spesifik.			
--	-----------	--	--	--

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :

A. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria seperti pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	KRITERIA	BOBOT
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

	TOTAL	100
--	-------	-----

B. Penilaian isu strategis terhadap kriteria, sebagaimana pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala ke-						Total
		1	2	3	4	5	6	
1.	Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah	20	10	20	10	15	25	100
2.	Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jayawijaya 58,4 (skor PPH konsumsi tahun	20	10	10	10	15	20	85
3.	Lemahnya akses pangan masyarakat	20	10	20	10	10	20	90
4.	Fluktuasi harga	10	15	20	10	10	20	85
5.	Tingginya prosentase penduduk rawan Pangan	15	10	20	15	15	20	95
6.	Lemahnya koordinasi lintas sector	20	10	20	15	10	20	95
7.	Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan	15	10	15	15	10	10	75

C. Selanjutnya dihitung rata-rata skor/ bobot setiap isu strategis dan disusun sesuai dengan peringkat tertinggi, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9. Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor

1	Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/ luar daerah	100	16,60
2	Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jayawijaya 58,4 (skor PPH konsumsi tahun 2018)	85	14,16
3	Lemahnya akses pangan masyarakat	90	15,00
4	Fluktuasi harga	85	14,16
5	Tingginya prosentase penduduk rawan pangan	95	15,83
6	Lemahnya koordinasi lintas sector	95	15,83
7	Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan	75	12,50

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yaitu :*“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”*.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 tersebut, ditetapkan pula Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP).
5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

Dikaitkan dengan visi dan misi dalam RPJMD tahun 2018-2023, serta unsur penunjang urusan Pangan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan terkait erat dengan Misi ke-1 dan Misi ke-3, yaitu :

Misi 1 : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*

Misi 3 : *Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.*

Kedua misi tersebut menjadi acuan utama dalam pembuatan rencana strategis DKP untuk masa pelaksanaan 5 tahun dengan memperhatikan berbagai faktor peluang dan tantangan yang ada, bertolak dari kondisi existing daerah, terutama dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi-misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya menetapkan tujuan sebagai sikap tanggap terhadap berbagai isu strategis yang terjadi.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya adalah :

1. Terkait dengan Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan tujuannya, yaitu :
 - 1.1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM ASN, dan
 - 1.2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan ketahanan pangan.Selanjutnya sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut, yaitu :
 - 1.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur DKP.
 - 1.2.1. Meningkatkan manajemen dinas dan transparansi nilai SAKIP
2. Terkait dengan Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan, maka ditetapkan tujuannya, yaitu :

Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, dengan indikator sarasanya adalah : Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)

- 2.1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama, dengan indikator sarasanya adalah : Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)
- 2.2. Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Kota, dengan indikator sarasanya adalah : Persentase Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan
- 2.3. Meningkatnya Pola Pangan Harapan, dengan indikator sasaran adalah : Skor Pola Pangan Harapan
- 2.4. Meningkatkan perekonomian pada sektor ekonomi produktif. Sasaran yang hendak dicapai, yaitu :Terjaganya ketersediaan pangan untuk masyarakat/keluarga.

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERIODE TAHUN 2019 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	KONDISI AWAL	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan tujuannya, yaitu :									
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai SAKIP	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	50,10	51,25	63,87	65,25	67,78	70,10
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketahanan pangan sesuai Kompetensi Jabatan	80,30	85,20	88,40	93,10	96,30	100,00
Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan, maka ditetapkan tujuannya, yaitu :									
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	2.235	2.385	2.385	2.388	2.390	2.392
		Meningkatnya Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	40,0	44,6	50,8	56,9	63,1	69,2
		Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pokok Kabupaten	Persentase Jumlah peningkatan cadangan pangan masyarakat	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	100 %
		Menurunya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	70 %	65 %	50 %	40 %	35 %	20 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Formulasi strategi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya adalah sbb. :

Tabel 5.1. Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Ketersediaan pangan utama	Jumlah ketersediaan pangan (beras dan umbi-umbian), merupakan jumlah bersih yang dihitung dikurangi	Jumlah ketersediaan pangan (beras dan umbi-umbian), untuk dikonsumsi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan

	ekspor, perubahan stok, tercecer dan benih	dibagi Jumlah penduduk	
2. Skor Pola Pangan Harapan			
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bertambahnya jumlah pelayanan tahun ini dibanding jumlah pelayanan tahun sebelumnya dinyatakan dalam persen (%)	Jumlah pelayanan tahun sekarang di bagi tahun lalu dikali 100%	Sekretaris
2. Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan, cadangan pangan, konsumsi yang bergizi berimbang dan aman (B2SA)	Jumlah produksi, ditambah tahun ini dikurangi jumlah produksi tahun lalu di bagi jumlah penduduk dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2. Kepala Bidang Cadangan Pangan 3. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragan Pangan

			4. Kepala Bidang Keamanan Pangan
Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon IV)			
1. Jumlah dokumen PPH yang disusun	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah laporan yang disusun dibagi target jumlah laporan dikali 100%	Seksi Konsumsi Pangan
2. Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan yang disusun dibagi target jumlah laporan dikali 100%	Seksi Ketersediaan Pangan
3. Jumlah dokumen pemetaan kerawanan pangan (FSVA)	Jumlah laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)	Jumlah laporan yang disusun dibagi target jumlah laporan dikali 100%	Seksi Kerawanan Pangan
4. Jumlah kampung stunting yang diberdayakan	Jumlah kampung stunting yang difasilitasi kegiatan pengembangan pekarangan untuk penganekaragaman pangan	Jumlah kampung stunting yang diberdayakan dibagi target jumlah kampung dikali 100%	1. Seksi Promosidan Penganekaragaman Pangan 2. Seksi Konsumsi Pangan

5. Jumlah menu diversifikasi pangan yang di lombakan	Jenis dan jumlah menu pangan yang ikut di lombakan ditingkat kabupaten dan provinsi	Jumlah menu pangan yang ikut di lombakan dibagi target jumlah menu dikali 100%	Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan
6. Jumlah komoditas yang mutu dan keamanan pangannya diawasi	Optimalisasi pengawasan keamanan pangan dengan menggunakan rapid test kit	Jumlah pengawasan dibagi target jumlah pengawasan dikali 100%	Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
7. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Penguatan kelembagaan keamanan pangan	Jumlah lembaga yang disosialisasi dibagi jumlah lembaga dikali 100%	Seksi Kelembagaan dan Keamanan pangan
8. Jumlah laporan/dokumen yang disusun	Penyusunan laporan ASET dan kepegawaian,	Jumlah dokumen yang dibuat dibagi target dikali 100%	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
9. Jumlah dokumen yang disusun	Penyusunan RENSTRA, RENJA dan LAKIP tahun/periode berjalan	Jumlah dokumen yang dibuat dibagi target dikali 100%	Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi

10. Jumlah dokumen yang disusun	Penyusunan laporan keuangan tahun berjalan	Jumlah dokumen yang dibuat dibagi target dikali 100%	Kasubbag. Keuangan
11. Jumlah dokumen kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dihasilkan	Penyusunan dokumen kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah dokumen yang dibuat dibagi target dikali 100%	Seksi Distribusi Pangan
12. Jumlah cadangan pangan masyarakat yang ditingkatkan	Tersedianya cadangan pangan masyarakat	Jumlah fasilitasi cadangan pangan dibagi target dikali 100%	Seksi Cadangan Pangan

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023

VISI	: <i>“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara”</i>		
MISI	: <i>“Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan”</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap	Penguatan Sumber- sumber ketersediaan pangan	Melaksanakan Koordinasi terhadap Pihak-pihak terkait.
		Pengendalian Ketersediaan Pangan	Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan terhadap distribusi pangan
		Penguatan keamanan pangan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi keamanan konsumsi pangan pangan
	Meningkatkan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Pengembangan Cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat	Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan

			bantuan cadangan pangan masyarakat.
		Meningkatkan system distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Menguatkan sistem jaringan distribusi dan harga secara berkala
	Mengkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat mengenai Pola Konsumsi	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Menciptakan Keberagaman Pangan Meningkatkan Pengetahuan Pangan yang sehat

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023

VISI :	<i>“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara”</i>		
MISI :	<i>“Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan”</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap	Penguatan Sumber- sumber ketersediaan pangan	Melaksanakan Koordinasi terhadap Pihak-pihak terkait.
		Pengendalian Ketersediaan Pangan	Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan terhadap distribusi pangan
		Penguatan keamanan pangan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi keamanan konsumsi pangan pangan
	Meningkatkan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Pengembangan Cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat	Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat.

		Meningkatkan system distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Menguatkan sistem jaringan distribusi dan harga secara berkala
	Mengkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat mengenai Pola Konsumsi	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Menciptakan Keberagaman Pangan Meningkatkan Pengetahuan Pangan yang sehat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. RENCANA PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan, pengerahan semua sumber daya sebagai masukan (input) dalam bentuk SDM, barang, jasa atau modal, untuk menghasilkan keluaran (output).

Rencana Program selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusun dalam bentuk matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Penyusunan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya untuk periode pelaksanaan tahun 2019-2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terdapat 5 (lima) rencana program utama, yaitu :

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

6.2. RENCANA KEGIATAN

Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah yang dirumuskan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya untuk masa pelaksanaantahun 2019-2023. Kemudian target kinerja program dinyatakan dalam persentase dan kerangka pendanaan dalam satuan rupiah. Terdapat 9 (Sembilan) rencana kegiatan yang ditetapkan untuk dilaksanakan dalam masa 5 (lima) tahun kedepan, untuk masing-masing program, berikut target kinerja yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023

Program	Kegiatan	Target Kinerja
Program Penunjang Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian administrasi umum dan keuangan
	2. Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun
	3. Administrasi Umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan
	4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Disiplin ASN
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai kebutuhan daerah dlm rangka menstabilkan pasokan dan harga Pangan	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok lainnya sesuai kebutuhan daerah dlm rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan

	2. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal
Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Data Base Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019, selanjutnya dalam pelaksanaan rencana kegiatan dibagi lagi kedalam 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.2. Rencana Kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja
1. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan	
3) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP
3. Kegiatan : Administrasi Umum	
4) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan
5) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Telepon, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor
6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi pemeliharaan dan perizinan
7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar
8) Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg disediakan
9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan
10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yg disediakan
11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
12) Penyediaan peralatan rumah tangga bagi kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga bagi Kantor yang disediakan

13) Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat yang disediakan
14) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja
15) Sosialisasi/Penyuluhan/Survey Lapangan/Monitoring dalam daerah *)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi
16) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas *)	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun
17) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/ Gedung Kantor DKP *)	Jumlah Pagar Gedung kantor DKP yang dibangun
18) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan
19) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Teskit yang diadakan
20) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
21) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara
22) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang difasilitasi

23) Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kerja yang terpelihara
24) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara
25) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhabilitasi
26) Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi
4. Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
27) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah ASN yang mendapat Seragam Dinas
28) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ASN Yang mendapat seragam batik Papua dan seragam Olah Raga
Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja
5. Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	
29) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun
30) Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun
31) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Produksi yang dibangun

<p>6. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai kebutuhan daerah dlm rangka menstabilkan pasokan dan harga Pangan</p>	
<p>32) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</p>	<p>Jumlah dokumen NBM yang disusun</p>
<p>33) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p>	<p>Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal</p>
<p>34) Pemantauan Stock, Pasokan dan harga Pangan</p>	<p>Jumlah laporan stok, pasokan dan harga pangan yg tersusun</p>
<p>35) Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan</p>	<p>Jumlah lembaga yg dikembangkan dan jumlah dokumen yg disusun</p>
<p>36) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</p>	<p>Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbentuk</p>
<p>37) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun</p>	<p>Jumlah dokumen Skor Konsumsi Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun</p>
<p>38) Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis lokal</p>	<p>Jumlah Kampung Stunting yang diberdayakan</p>
<p>39) Pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan *)</p>	<p>Capaian pembinaan kampung ramah anak</p>

40) Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian *)	Jumlah masyarakat yang dilatih
41) Pengembangan Desa Mandiri Pangan *)	Jumlah desa yang mendapat pendampingan
Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja
7. Kegiatan : Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi	
42) Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga minimum pangan lokal	Jumlah dokumen Ketersediaan Informasi , Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
8. Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
43) Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Data Base Potensi Produk Pangan yang disusun
9. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota	
44) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Pengawasan Keamanan pangan

45) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
46) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Komoditas Pangan Segar yang tersertifikasi
47) Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar	Jumlah Laboratorium dan rumah petugas pengawas mutu dan keamanan pangan yg dibangun

Secara terinci Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023, disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA PERIODE 2019 - 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN (Permendagri No. 13 thn 2010)	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN (Permendagri No. 90 thn 2019)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KINERJA KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF										Kondisi Kinerja akhir periode	Rupiah (000)	Unit Kerja	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
								Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik	2.21.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian administrasi umum dan keuangan			511.522		634.000		727.496		3.820.750		3.031.000		11.724.768			
				2.9.1.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian administrasi umum dan keuangan			-		-		80.000		105.000		120.000		305.000			
				2.9.1.1.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan evaluasi			-			12 bulan	60.000	12 bulan	80.000	12 bulan	90.000	60 bulan	230.000	DKP	Vamena dan Jayapura	

				2.9.1.1.01.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah			-		12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	12 bulan	30.000	60 bulan	75.000	DKP	Wamena	
				2.9.1.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun			15.000	10.000		15.000		20.000		25.000		85.000			
				2.9.1.1.02.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Dokumen	15.000	Dokumen	10.000	Dokumen	15.000	Dokumen	20.000	Dokumen	25.000	5 Dokumen	85.000	DKP	Wamena
		2.21.2.21.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.9.1.2.03	Administrasi Umum	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan an di bidang ketahanan pangan			32.730	44.000		78.909		91.000		356.000		3.152.639			
		2.21.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.9.1.2.03. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk		1 Tahun	3.000	12 Bulan	10.000	1 Tahun	3.500	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.000	5 Tahun	36.500	DKP	Wamena
		2.21.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2.9.1.2.03.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Telepon, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor		12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	12 bulan	24.900	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	60 bulan	119.900	DKP	Wamena

		.2.21.01.01 .06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	2.9.1.2.03.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi pemeliharaan dan perizinan	PKB 1 unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	unit mobil an 20 unit sepeda Motor	7.000	1 unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	10.000	1 unit mobil dan 20 unit sepeda Motor	6.000	1 unit mobil dan 22 unit sepeda Motor	10.000	1 unit mobil dan 24 unit sepeda Motor	10.000	PKB 5 th (1 unit mobil dan 24 unit sepeda Motor)	43.000	DKP	Wamena
		.2.21.01.01 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.9.1.2.03.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar		12 OB	24.000	12 OB	24.000	12 OB	24.000	12 OB	36.000	12 OB	36.000	60 OB	144.000	DKP	Wamena
		.2.21.01.01 .10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.9.1.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg disediakan		12 bulan	28.900	12 bulan	40.000	12 bulan	28.684	12 bulan	75.000	12 bulan	80.000	60 bulan	252.584	DKP	Wamena
		.2.21.01.01 .11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.9.1.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan		12 bulan	10.000	12 bulan	25.000	12 bulan	13.352	12 bulan	60.000	12 bulan	70.000	60 bulan	178.352	DKP	Wamena
		2.21.01.01 .12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.9.1.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yg disediakan		12 bulan	4.902	12 bulan	5.000	12 bulan	5.388	12 bulan	20.000	12 bulan	20.000	60 bulan	55.290	DKP	Wamena

		2.21.01.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.9.1.2.03.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	5.000	10 Jenis	5.000	10 Jenis	4.440	10 Jenis	20.000	10 Jenis	20.000	50 Jenis	54.440	DKP	Wamena
		2.21.01.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	2.9.1.2.03.14	Penyediaan peralatan rumah tangga bagi kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga bagi Kantor yang disediakan	12 Bulan	15.000	10 Jenis	10.000			15 Jenis	25.000	15 Jenis	25.000	30 Jenis	75.000	DKP	Wamena
		2.21.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2.9.1.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat yang disediakan	12 bulan	14.928	12 bulan	15.000	12 bulan	24.630	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	60 bulan	174.558	DKP	Wamena
		2.21.01.01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2.9.1.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000	12 bulan	344.015	12 bulan	450.000	12 bulan	500.000	60 bulan	.015	DKP	Wamena
		2.21.01.01.19	Sosialisasi/ Penyuluhan/Survey Lapangan/ Monitoring dalam Daerah			Jumlah Monitoring dan Evaluasi	12 bulan	50.000	12 bulan	75.000							24 bulan	5.000	DKP	Wamena

		2.21.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.9.1.2.03.	Administrasi Umum	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja			2.013.792		.080.000		153.587		2.838.750	0		16.129			
		2.21.01.02.02	Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas			Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	unit Rumah Dinas		-	-	-		-	1 unit rumah dinas	700.000	1 unit rumah dinas	700.000	6 unit rumah dinas	1.400.000	DKP	Wamena
		2.21.01.02.03	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/ Gedung Kantor DKP			Jumlah Pagar Gedung Kantor DKP yang dibangun	1 Unit (150 m)	150 M2	982.500	1 Unit Gedung Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan	700.000	1 Unit (200 m)	-	1 Unit (140 m)	1.400.000	-	-	1 Unit (450 m)	3.082.500	DKP	Wamena
		2.21.01.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	2.9.1.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	unit mobil dan 20 unit sepeda motor	3 Unit sepeda Motor	87.340				-		-	2 unit kendaraan dinas sepeda motor	70.000	1 unit Mobil 22 unit sepeda motor	157.340	DKP	Wamena
		2.21.01.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Teskit yang diadakan	21 set teskit	set teskit	6.750	5 Set Teskit	35.000	5 set Teskit	21.187	5 set Teskit	33.750	5 set Teskit	35.000	28 unit meja+kursi dan 22 set teskit	131.687	DKP	Wamena
		2.21.01.02.08	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg diadakan	unit printer, 8 unit Computer PC, 2 Unit Laptop	Laptop, 2 computer C, 6 Kursi Jabatan	97.202	2 Unit Printer, 2 unit Computer PC, 2 unit Laptop	60.000	3 unit Laptop dan 1 unit Printer	55.000	10 unit Laptop dan 5 unit Printer	200.000	10 unit Laptop dan 5 unit Printer	200.000	8 unit komputer PC, 22 unit Laptop dan 23 unit Printer	612.202	DKP	Wamena

		2.21.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.9.1.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		unit gedung kantor DKP	1 Unit gedung kantor	10.000	1 unit gedung kantor DKP	10.000	1 unit gedung kantor DKP	18.000	1 unit gedung kantor DKP	50.000	1 unit gedung kantor DKP	50.000	1 unit gedung kantor DKP	138.000	DKP	Wamena
		2.21.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.9.1.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang difasilitasi	1 unit mobil + 20 unit sepeda motor	unit mobil + 20 unit sepeda motor	39.000	1 unit mobil + 20 unit sepeda motor	45.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	45.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	75.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	75.000	1 unit mobil + 22 unit sepeda motor	279.000	DKP	Wamena
		2.21.01.02.26	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.30	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kerja yg terpelihara		-	-	15 Kursi dan 15 Meja Kerja	15.000		-		-	1 Paket	20.000	1 Paket	000		Wamena
		2.21.01.02.27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.9.1.2.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	10 unit komputer, 6 unit laptop, 15 unit printer,	5 unit komputer, 6 unit printer	5.000	5 unit komputer, 6 unit printer,	15.000	5 unit komputer, 6 unit printer, 31 unit meubelair	14.400	5 unit komputer, 6 unit printer, 31 unit meubelair	30.000	5 unit komputer, 6 unit printer, 31 unit meubelair	30.000	25 unit komputer, 30 unit printer, 93 meubelair	94.400	DKP	Wamena
		2.21.01.02.42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2.9.1.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang direhabilitasi	1 Unit	Unit/60 M	393.000		-		-		-	1 unit gedung kantor DKP	500.000	unit gedung kantor DKP	893.000	DKP	Wamena

		2.21.01.02.41	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	2.9.1.2.03.37	Rehabilitasi Sedang/Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi		Unit/60 M	393.000	90 M2	200.000	1 Unit	-	1 Unit	350.000	1 Unit	350.000	4 unit	1.293.000	DKP	Wamena
	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan (1)	2.21.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	2.9.1.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Disiplin ASN			-		-		-		66.000		-		66.000		Wamena
		2.21.01.03.02	Kgtan. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	2.9.1.2.04.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan.	Jumlah ASN yang mendapat Seragam Dinas	-		-		-		30 stel pakaian dinas (keki + putih-hitam)	36.000		-	30 stel pakaian dinas (keki + putih-hitam)	36.000	DKP	Wamena	
		2.21.01.03.05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	2.9.1.2.04.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ASN Yang mendapat seragam batik Papua dan seragam Olah Raga	-		-		-		30 Stel baju batik papua dan 30 pasang kaos OR	30.000		-	30 Stel baju batik papua dan 30 pasang kaos OR	30.000	DKP	Wamena	
2				2.9.2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKO NOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				-		-	5.500.000		6.000.000		6.300.000		17.800.000			

				2.9.2.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan				-		-	5.500.000		6.000.000		6.300.000		17.800.000			
		2.21.01.16.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	2.9.2.2.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun			-		-	2 Unit	1.500.000	2 Unit	1.600.000	2 Unit	1.700.000	6 Unit	4.800.000	DKP	Kab. Jayawijaya
				2.9.2.2.01.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun						2 Unit (200 M2)	2.000.000	2 Unit (200 M2)	2.200.000	2 Unit (200 M2)	2.300.000	6 Unit	6.500.000	DKP	Kab. Jayawijaya
				2.9.2.2.01.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Produksi yang dibangun						1 Unit beserta perlengkapannya	2.000.000	1 Unit beserta perlengkapannya	2.200.000	1 Unit beserta perlengkapannya	2.300.000	3 Unit beserta perlengkapannya	6.500.000	DKP	Kab. Jayawijaya
3				2.9.3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				900.000		500.000	2.363.813		6.375.000		6.375.000		16.513.813			

				2.9.3.2,01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai kebutuhan daerah dim rangka menstabilkan pasokan dan harga Pangan	Terlaksana nya penyediaan dan penyaluran pangan pokok lainnya sesuai kebutuhan daerah dim rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan			900.000		500.000		2.343.813		6.275.000		6.375.000		16.293.813		
		2.21.2.21.0 1.16.13	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	2.9.3.2,01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen NBM yang disusun		9 Distrik	300.000			1 Dokumen	65.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	300 ton beras premium	565.000	DKP	Wamena
		2.21.2.21.0 1.15.12	Penanganan Pasca Panen dan hasil pertanian	2.9.3.2,01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi pembinaan dan fasilitasi upaya penyediaan bahan pangan lokal			-	-	2 Desa	600.000	2 Desa	700.000	2 Desa	700.000	150 Orang	2.000.000	DKP	Kab. Jayawijaya	
				2.9.3.2,01.4	Pemantauan Stock, Pasokan dan harga Pangan	Jumlah laporan stok, pasokan dan harga pangan yg tersusun			-	-	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	3 Dokumen	300.000			

				2.9.3.2.01.5	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah lembaga yg dikembangkan dan jumlah dokumen yg disusun					1 Dokumen / 1 lembaga	100.000	1 Dokumen / 1 lembaga	100.000	1 Dokumen / 1 lembaga	100.000	3 Dokumen / 1 lembaga	300.000			
				2.9.3.2.01.6	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbentuk			-	-	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	3 Unit	3.400.000			
		2.21.2.21.01.16.03	Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	2.9.3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Jumlah dokumen Skor Konsumsi Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun	1 BH dokumen PH	1 BH dokumen BM dan PPH	100.000	1 bh dokumen NBM dan PPH	75.000	1 bh dokumen PPH Konsumsi	28.813	1 bh dokumen PPH Konsumsi	75.000	1 bh dokumen PPH Konsumsi	75.000	1 bh dokumen PPH Konsumsi	353.813	DKP	Wamena
			Pengembangan konsumsi pangan	2.9.3.2.04.2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan konsumsi pangan berbasis lokal	Jumlah Kampung Stunting yang diberdayakan				-	7 Kampung	450.000	20 Kampung	4.000.000	20 Kampung	4.000.000	27 Kampung	8.450.000			

			Pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan			Capaian pembinaan kampung ramah anak		Kampung	200.000	10 Kampung	150.000						10 Kampung	350.000			
			Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian			Jumlah masyarakat yang di latih		50 Orang	100.000	30 Orang	75.000						30 Orang	175.000			
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan			Jumlah desa yang mendapat pendampingan		2 Desa	200.000	2 Kampung	200.000						2 Kampung	400.000			
					Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal			-		-		20.000		100.000		100.000		220.000		
		2.21.2.21.01.16.21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	2.9.3.2.03.1	Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan harga minimum pangan lokal	Jumlah dokumen Ketersediaan Informasi , Pemantauan dan analisis harga pangan pokok						1 Kali (1 dokumen)	20.000	3 Kali (1 dokumen)	100.000	3 Kali (1 dokumen)	100.000	3 Kali (3 dokumen)	220.000	DKP	Wamena

4	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi lokal dan pengembangan wilayah berbasis kul tural se cara berkelanjutan	2.21.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			-		75.000		100.000		110.000		120.000		405.000		
				2.9.4.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Data Base Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan			-		75.000		100.000		110.000		120.000		405.000		
		2.21.01.16.02	Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	2.9.4.2.01.1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Data Base Potensi Produk Pangan			1 Dokumen (2 Distrik)	75.000	1 Dokumen (6 Distrik)	100.000	1 Dokumen (6 Distrik)	110.000	1 Dokumen (6 Distrik)	120.000	4 Dokumen	405.000		DKP	Wamena
5				2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian pengawasan keamanan pangan				75.000		2.719.000		300.000		450.000		3.644.000			
				2.9.5.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.			100.000		75.000		2.719.000		300.000		450.000		3.644.000		

					Daerah Kabupaten Kota																
		2.21.01.16.22	Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	2.9.5.2.01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Pengawasan Keamanan pangan		-	-	-	3 Orang	69.000	4 Orang	100.000			7 Orang	169.000	DKP	Bogor	
						Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Distrik 150 Orang	100.000	50 Pedagang	75.000	3 Kampung (30 orang)	150.000	4 Kampung	200.000	4 Kampung	250.000	11 Kampung	775.000	DKP	Wamena
				2.9.5.2.01.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Komoditas Pangan Segar yg tersertifikasi					-				5 Komoditas	200.000	5 Komoditas	200.000	DKP	Wamena	
				2.9.5.2.01.5	Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar	Jumlah Laboratorium dan rumah petugas pengawasan mutu dan keamanan pangan yg dibangun			-			2 unit	2.500.000				2 unit	2.500.000	DKP	Wamena	
TOTAL									3.511.522		2.284.000		11.410.309		16.605.750		16.276.000		50.087.581		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (**ex ante**), tahap pelaksanaan (**on going**), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (**ex post**). Kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan selama periode 2018-2023 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2018-2023. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (**impact**) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (**outcome**) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program

perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (**impact**) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (**outcome**) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggung jawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan transportasi yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan transportasi yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PANGAN								
	PENCAPAIAN SAKIP		50,10	54,40	58,75	63,80	66,30	70,10	
	KUALITAS PELAUANAN DINAS KETAHANAN PANGAN	%	80,30	85,20	88,40	93,10	96,30	100,00	
	Situasi Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita/Tahun)	2.235	2.385	2.385	2.388	2.390	2.392	
	Situasi Skor Pola Pangan Harapan	%	40,0	44,6	50,8	56,9	63,1	69,2	
	peningkatan cadangan pangan masyarakat	Ton	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	100 %	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70 %	65 %	50 %	40 %	35 %	20 %	

BAB VII

PENUTUP

7.1. RINGKASAN

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan yang telah tersusun ini selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya di masing-masing bidang, yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan sangat bergantung kepada berjalan atau tidaknya koordinasi dan sinergitas dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dan bertanggung jawab.

RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijayaini disusun untuk dapat memperkuat strategi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, terdiri dari 5 (lima) Rencana Program yang meliputi 9 (sembilan) Rencana Kegiatan yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) Rencana Sub Kegiatan. Rencana program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis ini disusun berdasarkan skala prioritas di Dinas Ketahanan Pangan, dengan total kebutuhan pembiayaan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan sebesar Rp 50.087.581.000,- (lima puluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

7.2. SARAN

Apabila diperhatikan lebih seksama perkembangan pola hidup masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya pola konsumsi dan kebutuhan pangan, menjadi tantangan utama bagi Pemerintah

Kabupaten Jayawijaya untuk mengupayakan penyediaan kebutuhan tersebut secara cukup. Ketahanan pangan daerah bukan hanya dilihat dari kecukupan jenis dan jumlah bahan pangan yang disediakan untuk kurun masa tertentu, akan tetapi juga mencakup kesadaran penduduk untuk meningkatkan mutu pangan dan konsumsi yang cukup secara berkelanjutan.

Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan bahwa setiap penduduk di daerah ini dapat dengan mudah dan mampu mengakses pangan secara bermartabat. Berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat agar lebih dipertajam dengan mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya dinas, sehingga hasil-hasil pembangunan pangan dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak positif kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang lainnya.

Karena besarnya tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan sehubungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mensukseskan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, khususnya di bidang pembangunan pangan masyarakat yang madani, maka diharapkan adanya perhatian dan dukungan yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, baik dukungan yang berupa kebijakan regulasi maupun dukungan yang berupa kebijakan penyediaan anggaran yang cukup bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Demikian pula, karena hampir seluruh tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi lainnya yang seiringan mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, maka diharapkan agar seluruh Dinas/Badan dan stakeholder lainnya senantiasa menjalin koordinasi dan kerjasama yang harmonis, saling memberikan informasi dan dukungan, sehingga setiap permasalahan pembangunan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**Drh. YMADE PUTRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650416 199703 1 003**